

**KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE WILAYAH
KERJA SOTA DALAM CEGAH TANGKAL PENYAKIT MENULAR DI WILAYAH
PERBATASAN RI-PNG DISTRIK SOTA KABUPATEN MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN**

Amiroh Durotun Nashiah

NPP. 30.1429

Asdaf Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: adnashiah13@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Agus Supriadi Harahap, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the performance of Merauke Class III Port Health Office in Sota working area to preventing infectious disease at RI-PNG border area in district Sota, Merauke regency. **Purpose:** This study aims to know the the performance of the Merauke Class III Port Health Office in Sota Work Area in implementing prevention of infectious diseases in the Sota District work area as well as supporting and inhibiting factors in the implementation of prevention of infectious diseases by the Merauke Class III Port Health Office Work Area Sota. **Method:** This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach and uses the theory from Agus Dwiyanto (2006) regarding 5 indicators of organizational performance measurement which include productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. **Result:** The findings are the performance of the Merauke Class III Port Health Office in the Sota Working Area in implementing prevention of infectious diseases at the RI-PNG border is not good enough because it has not fulfilled all the assessment indicators. **Conclusion:** Assessment indicators that are not met cause slow service provided by activities, inspection and checking of passers is not optimal in terms of time and passers service.

Keywords: Health, Human Resources, Contagious Disease

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): peneliti berfokus pada kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dalam melaksanakan cegah tangkal penyakit menular di wilayah perbatasan RI-PNG di Distrik Sota Kabupaten Merauke **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dalam penyelenggaraan cegah tangkal penyakit menular di wilayah kerja Distrik Sota serta faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan cegah tangkal penyakit menular oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan menggunakan teori dari Agus Dwiyanto(2006) mengenai 5 indikator pengukuran kinerja organisasi yang meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu kinerja dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dalam penyelenggaraan cegah tangkal penyakit menular di perbatasan RI-PNG belum cukup baik sebab belum memenuhi keseluruhan indikator penilaian. **Kesimpulan:** indikator penilaian yang tidak terpenuhi menyebabkan lambatnya pelayanan yang diberikan, kegiatan pemeriksaan dan pengecekan pelintas menjadi tidak optimal dalam waktu dan pemberian layanan. **Kata kunci:** Kesehatan, SDM, Penyakit Menular

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan dasar setiap warga Negara yaitu kebutuhan Kesehatan yang diselenggarakan dalam bentuk Sistem Kesehatan Nasional. Pembangunan pada bidang kesehatan diadakan untuk memberi jaminan cukupnya upaya dalam bidang kesehatan, berupa upaya kesehatan masyarakat ataupun upaya kesehatan perorangan yang baik, terjangkau serta merata oleh masyarakat. Upaya Kesehatan diselenggarakan dengan mengutamakan upaya pencegahan (preventif) serta peningkatan kesehatan (promotif) untuk seluruh warga Negara Indonesia, yang tidak melupakan upaya terhadap pemulihan Kesehatan (rehabilitatif) serta penyembuhan penyakit (kuratif). Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) ialah unit pelaksanaan kesehatan terutama upaya promotif serta preventif, serta tetap memberikan upaya kuratif saat melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kantor Kesehatan Pelabuhan memiliki tugas utama melaksanakan pencegahan keluar serta masuknya penyakit menular, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, penyakit potensial wabah, pengawasan OMKABA (Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif) pelayanan kesehatan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, dan juga pengamanan akan penyakit baru, bioterrorisme, juga pengamanan radiasi pada wilayah kerja bandara, pelabuhan serta lintas batas darat Negara.

Kantor Kesehatan Pelabuhan berperan penting untuk merealisasikan terwujudnya wilayah kerja bandara serta pelabuhan yang bebas dari penularan penyakit dengan mengatur tata cara serta pengendalian penyakit, yang sifatnya menular maupun tidak. Untuk itu dalam melaksanakan cegah tangkal penyakit menular, Kantor Kesehatan Pelabuhan harus mampu melindungi Negara dari penularan maupun penyebaran penyakit menular yang dibawa manusia, alat angkut maupun barang bawaan yang terikut serta melalui pintu masuk wilayah atau Negara. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan bertujuan memberikan perlindungan pada masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang memiliki potensi padadarurat kesehatan masyarakat, pencegahan serta penangkalan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang memiliki potensi darurat

kesehatan masyarakat, menekan laju ketahanan nasional pada bidang kesehatan masyarakat dan menyediakan perlindungan kepastian hukum untuk petugas kesehatan serta masyarakat. Menteri Kesehatan menyatakan kasus penyakit menular Tuberkulosis di Provinsi Papua pada tahun 2020 mencapai 8.368 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 2.982, hal ini menunjukkan adanya ancaman yang besar dari penyebaran penyakit menular Tuberkulosis sehingga diperlukan adanya tindakan untuk menekan laju penyebaran penyakit menular, salah satunya yang dibawa masuk melalui wilayah perbatasan Negara.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Sesuai Permenkes Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke memiliki tugas melaksanakan pencegahan keluar serta masuknya penyakit menular serta potensial wabah, pelayanan kesehatan pada wilayah kerja Pelabuhan/Bandara dan Lintas Batas Negara, kekarantinaan, dan juga pengendalian dampak kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku. Distrik Sota sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini menjadikan kawasan pertahanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota kerap dilalui oleh pelintas baik WNA maupun WNI. Jumlah pelintas terhitung bulan Januari 2022-Juni 2022 mencapai 1.950 orang dengan 301 keberangkatan WNI dan 1.649 kedatangan WNA. Dilihat dari tingginya arus lintas batas di wilayah perbatasan antar negara RI-PNG serta kemungkinan terbawanya wabah penyakit menular oleh pelintas yang menimbulkan adanya ancaman penyakit menular yang dibawa masuk melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota maka dari itu diperlukan adanya penanggulangan bencana non alam berupa wabah penyakit menular dalam bentuk cegah tangkal penyakit menular yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota di wilayah perbatasan Negara sebagai garda terdepan dalam pencegahan terhadap ancaman wabah penyakit menular. Sebagai tindakan pencegahan terhadap penyakit menular yang masuk dari luar yang dibawa oleh pelaku perjalanan Internasional ke Indonesia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pelaku perjalanan Internasional melalui pengecekan fisik, pengukuran suhu dan rapid test untuk mencegah masuknya penyakit menular terutama penyakit menular dengan tingkat fatalitas yang tinggi antara lain Tuberkulosis, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga Covid-19.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu, penelitian yang terfokus pada kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini kinerja KKP Kelas III Merauke dalam cegah tangkal penyakit menular di wilayah perbatasan RI-PNG. Penelitian oleh Ragus Mahendra, dkk. (2021) yang berjudul Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik menunjukkan bahwa untuk menilai kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan publik dapat dilihat dari unsur tanggung jawab, kemampuan kerjasama, ketelitian kerja dan kejujuran dalam bekerja sehingga perlu pengembangan sumber daya manusia berupa pelatihan maupun diklat dalam rangka peningkatan kinerja aparatur sipil negara. Penelitian oleh Gradiana Thefa dan Florianus P. Thaal (2019) yang berjudul Kinerja Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Wini di Kawasan Perbatasan RI-RDTL Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur menemukan bahwa kinerja Pos Lintas Batas Negara Terpadu Wini dalam kegiatan pelayanan lintas batas belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat antara lain, keterbatasan sumber daya aparatur, keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antar unsur *Custom Immigration Quarantine* (CIQ), kesulitan perizinan dokumen perdagangan, serta kurangnya pemahaman masyarakat. Penelitian oleh Agusurio Azmi, dkk. (2022) yang berjudul Implementasi Kebijakan Keekarantinaan

Kesehatan Pada Keberangkatan Kapal Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai menunjukkan penyelenggaraan darurat kesehatan masyarakat dilaksanakan lebih komprehensif dan kompleks untuk mencapai tujuan mengurangi risiko masuk dan keluarnya penyakit menular, membatasi pergerakan pintu masuk dan keluar negara untuk pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah Kota Dumai melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai. Faktor penghambat dari implementasi kebijakan kekarantinaan kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai yakni minimnya sumber daya manusia di kantor wilayah, banyaknya kesalahan input pada aplikasi Sinarkes, serta pemeriksaan keberangkatan kapal (PHQC) belum optimal dilakukan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian ini menggunakan teori kinerja menurut (Agus Dwiyanto, 2006) untuk menilai kinerja dari KKP Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dalam cegah tangkal penyakit menular yang bertempat di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota. Dari penelitian terdahulu yang telah disampaikan, maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, perbedaan waktu dilaksanakannya penelitian, serta perbedaan pada fokus dan pembahasan yang diambil oleh peneliti sehingga penelitian sebelumnya hanya digunakan sebagai bahan referensi dan untuk memperkaya teori dalam penelitian. Adapun persamaan penelitian yaitu membahas mengenai kinerja dari aparatur sipil negara selaku pelayan publik dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat melalui penelitian deskriptif kualitatif.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dalam penyelenggaraan cegah tangkal penyakit menular di wilayah kerja Distrik Sota serta faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan cegah tangkal penyakit menular oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam metode ini peneliti mengamati dan menjelaskan fakta maupun fenomena yang bersifat khusus akan mendeskripsikan penelitian melalui kata-kata secara sistematis dari kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dalam cegah tangkal penyakit menular di wilayahperbatasan RI-PNG. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dalam usaha memperoleh informasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Wilayah Kerja Sota dalam upaya pencegahan penyakit menular di Wilayah Perbatasan RI-PNG Distrik Sota Kabupaten Merauke

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota Dalam Penyelenggaraan Cegah Tangkal Penyakit Menular di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota Kabupaten Merauke

Dalam pembahasan ini peneliti menganalisis fokus penelitian dalam menilai kinerja dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota menggunakan teori dari Agus Dwiyanto (2006) mengenai 5 indikator pengukuran kinerja organisasi meliputi: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas

Produktivitas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pelaku lintas batas dengan memberikan pelayanan yang maksimal. Pengukuran produktivitas kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dinilai berdasarkan kuantitas jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat selaku pelintas batas negara. Kuantitas jenis layanan yang diberikan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dalam mencegah masuknya penyakit menular di wilayah perbatasan berupa pemeriksaan dan pengecekan bagi setiap pelaku lintas batas melalui pengecekan suhu, *screening*, hingga *rapid test* bagi pelintas WNA yang hendak masuk ke wilayah RI. Selain itu dilakukan juga pengendalian risiko lingkungan melalui *fogging*, pemusnahan jentik nyamuk, dan pemasangan perangkap tikus.

Kualitas Layanan merupakan pengukuran kepuasan akan kualitas layanan yang disediakan oleh KKP Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dalam melaksanakan perannya dalam cegah tangkal penyakit menular di Perbatasan RI-PNG. Penilaian kualitas layanan oleh KKP Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota berdasarkan kemudahan dan kejelasan informasi serta ketersediaan fasilitas yang diterima oleh pelaku lintas batas RI-PNG. Informasi yang diberikan berupa spanduk atau *banner* yang memberikan kejelasan dan informasi tentang bahaya penyakit menular beserta penyebab atau virus pembawa penyakit, edukasi dalam menjaga kesehatan diri maupun lingkungan, dan penjelasan alur lintas batas di PLBN Sota. Sehingga membantu memberikan kejelasan kepada pelaku lintas batas, kemudahan dan kejelasan informasi yang dirasakan oleh pelaku lintas batas selaku penerima layanan dibuktikan dengan pelaku lintas batas yang telah paham alur pemeriksaan dan pengecekan serta telah memiliki kesadaran diri akan kesehatan pribadi sebelum melakukan perjalanan lintas batas.

Sementara itu ketersediaan fasilitas penunjang dari KKP Kelas III wilayah kerja Sota dinilai masih kurang sebab masih ada beberapa alat yang belum digunakan karena faktor lokasi yang tidak mendukung seperti *termo scanner* yang tidak dapat digunakan sebab sangat sensitif di tempat yang terlalu panas sehingga dalam pengecekan suhu hanya menggunakan *termo gun* yang kurang efisien dalam waktu karena harus dilakukan pengecekan suhu manual satu persatu dan apabila jumlah pelintas meningkat maka proses pengecekanpun akan lama dan memerlukan waktu. Selain itu alat untuk melaksanakan *rapid test* yang dimiliki KKP Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota terbatas dalam segi jumlah sehingga terkadang harus menunggu datangnya alat dari kantor pusat di Kabupaten Merauke.

Responsivitas merupakan respon atau langkah cepat yang diambil oleh KKP Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota saat keadaan darurat yang dinilai berdasarkan penyusunan prosedur penanganan dan daya tanggap terhadap keadaan darurat. Berdasarkan Permenkes RI No 33 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota memiliki kewenangan untuk memulangkan WNA apabila terdeteksi gejala penyakit menular ke negara asalnya sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan negara. Dengan begitu responsivitas yang dilihat dari daya tanggap saat keadaan darurat oleh KKP Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota yaitu dengan langsung menolak masuknya WNA yang terindikasi penyakit menular sebelum melewati PLBN Sota.

Responsibilitas menjelaskan kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi yang dilaksanakan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota telah menentukan standar pelaksanaannya berdasarkan Permenkes RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. bentuk responsibilitas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota yang dinilai berdasarkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang

dilaksanakan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi telah sesuai dalam pelaksanaan cegah tangkal.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari KKP Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota kepada KKP Kelas III Merauke sebagai kantor pusat dalam bentuk laporan kinerja secara berkala setiap dua kali dalam satu tahun dan rekapan pelintas harian. Bentuk akuntabilitas KKP Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota berbentuk laporan kinerja dan rekapan pelintas harian.

3.2. Faktor Pendukung Dalam Penyelenggaraan Cegah Tangkal Penyakit Menular Oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota

Dalam penyelenggaraan cegah tangkal penyakit menular, KKP Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota terbantu dengan adanya PLBN Sota sebagai salah satu bentuk pelayanan satu atap dimana disediakan fasilitas kantor dan ruangan sebagai tempat pemberian layanan yang diisi oleh beberapa instansi lintas Kementerian yang mengurus pelintas batas negara seperti Imigrasi, Bea Cukai, Karantina Ikan, Karantina Pertanian, serta Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke. Untuk itu faktor pendukung dari penyelenggaraan cegah tangkal penyakit menular oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota yaitu adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota itu sendiri serta masyarakat yang mendukung proses kegiatan dengan mematuhi alur lintas batas yang telah ditetapkan.

3.3. Faktor Penghambat Dalam Penyelenggaraan Cegah Tangkal Penyakit Menular Oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota

Dalam penyelenggaraan cegah tangkal penyakit menular oleh KKP Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota tentu tidak terlepas dari adanya faktor penghambat. Yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan cegah tangkal penyakit menular di lapangan yaitu kurangnya tenaga medis atau SDM dan fasilitas medis yang terkadang terbatas serta berkas administrasi WNA yang terbatas.

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia atau Tenaga Medis Tambahan
KKP Kelas III Wilayah Kerja Sota masih kekurangan dalam jumlah tenaga medis yang bertugas melakukan pengecekan dan pemeriksaan bagi setiap pelintas. Dengan 2 (dua) pegawai negeri yang memiliki latar belakang ilmu kesehatan dan bantuan 1 tenaga honorer menunjukkan bahwa masih sangat kurangnya sumber daya manusia dalam jumlah maupun kualitas yang yang seharusnya dibutuhkan sehingga diperlukan adanya bantuan tambahan personil dari kantor induk di Kabupaten Merauke agar dapat meningkatkan kinerja dari KKP Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota.
- b. Fasilitas Medis Yang Terbatas
Dalam penyelenggaraan cegah tangkal penyakit menular di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota diperlukan fasilitas medis yang memadai guna memudahkan proses pemeriksaan dan pengecekan pelintas namun saat ini fasilitas medis yang dimiliki Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota masih kurang. Seperti yang telah disampaikan bahwa fasilitas pendukung dalam proses pemeriksaan masih terbatas yang hanya menggunakan *termo gun* sebagai alat pengukur suhu sebab *termo scanner* yang dimiliki tidak dapat digunakan sebab kondisi tempat yang terlalu panas dengan atap baja dapat menyebabkan alat yang sensitif tersebut menjadi eror. Selain itu alat *rapid test* yang

ada pun jumlahnya terbatas sehingga bila diperlukan dalam jumlah banyak maka harus menunggu datangnya alat dari kantor induk di Kabupaten Merauke.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dalam cegah tangkal penyakit menular di wilayah perbatasan RI-PNG Distrik Sota Kabupaten Merauke belum cukup baik sebab dalam penyelenggaraannya masih terdapat indikator dalam penilaian kinerja organisasi yang berdasarkan teori oleh Agus Dwiyanto (2006) indikator penilaian tersebut meliputi Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Berdasarkan hasil observasi peneliti, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota telah memenuhi indikator penilaian diantaranya indikator Produktivitas yang dinilai berdasarkan kuantitas layanan yang diberikan oleh KKP Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dalam penyelenggaraan cegah tangkal penyakit menular di PLBN Sota; indikator Responsivitas yang dinilai berdasarkan langkah cepat yang diambil oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota saat keadaan darurat dengan langsung menolak langsung pelintas dengan indikasi penyakit menular; indikator Responsibilitas yang dinilai berdasarkan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota berdasarkan Permenkes RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan; dan indikator akuntabilitas dimana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota menunjukkan bentuk pertanggungjawabannya melalui laporan kinerja yang dibuat dua kali dalam setahun dan rekapan pelintas harian. Namun walaupun empat indikator diatas telah terpenuhi namun ada satu indikator yang belum terpenuhi yaitu indikator Kualitas Layanan pada fasilitas kesehatan yang kurang sebagai penunjang proses pengecekan dan pemeriksaan kesehatan para pelintas. Hal ini menyebabkan terhambatnya pelayanan yang diberikan serta ketidakpuasan masyarakat selaku penerima layanan akibat dari keterbatasan alat yang dimiliki serta jumlah tenaga medis yang kurang bila dibandingkan dengan banyaknya jumlah pelintas tiap harinya. Dalam bentuk pelayanan masyarakat tentu hal ini merupakan indikator yang penting sehingga dengan tidak terpenuhinya indikator ini menyebabkan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dalam penyelenggaraan cegah tangkal penyakit menular di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dapat dikatakan masih kurang dan belum cukup baik. Pada penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu menunjukkan adanya perbedaan maupun persamaan yang dapat ditemukan seperti antara penelitian oleh Gradiana Thefa dan Florianus P. Thaal (2019) yaitu Kinerja Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Wini di Kawasan Perbatasan RI-RDTL Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang walaupun mengambil lokasi permasalahan yang sama yaitu di wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) namun tetap memiliki perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu ini membahas tentang kinerja dari PLBN itu sendiri dalam pelayanan perlintasan batas negara yang melibatkan kolaborasi beberapa instansi di PLBN dalam aktivitas perlintasan antar negara yang terdiri dari *Custom, Imigration & Quarantine* sedangkan pada penelitian yang sekarang hanya menilai kinerja dari satu instansi saja yang juga bertempat di PLBN namun berfokus pada bidang kesehatan yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota. Begitu pun dengan penelitian oleh Agusurio Azmi, dkk. (2022) Implementasi Kebijakan Kekejarantinaan Kesehatan Pada Keberangkatan Kapal Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai. Antara penelitian tersebut dengan penelitian terkini keduanya membahas a meneliti dari satu instansi yang sama yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III namun yang membedakan kedua penelitian tersebut terletak pada wilayah kerja dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

serta tugas pokok dan fungsi utama dari masing-masing wilayah kerja yang berbeda yang tentunya mempengaruhi fokus penelitiannya.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dalam penyelenggaraan cegah tangkal penyakit menular di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota berdasarkan indikator penilaian kinerja yang telah ditentukan, peneliti menilai Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dalam cegah tangkal penyakit menular di wilayah perbatasan RI-PNG masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan kekurangan yang ada pada indikator penting. Jumlah tenaga medis yang kurang menyebabkan lambatnya pelayanan yang diberikan akibat tidak sebanding antara pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dengan banyaknya pelintas. Selain itu keterbatasan fasilitas medis menyebabkan kegiatan pemeriksaan dan pengecekan pelintas menjadi tidak optimal dalam waktu dan pemberian layanan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu pada waktu pelaksanaan penelitian dan lokasi penelitian yang hanya dilakukan di lingkup perbatasan di Distrik Sota.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih cukup awal dilakukan untuk itu peneliti berharap adanya penelitian berikutnya pada lokasi yang sama yang berkaitan dengan kinerja dari KKP Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Koordinator Wilayah Kerja Sota Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke beserta staff Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke Wilayah Kerja Sota dan seluruh keluarga besar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Agusurio dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Kekejarantinaan Kesehatan Pada Keberangkatan Kapal Di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KANTOR KESEHATAN PELABUHAN) Kelas III Dumai.
- Dwiyanto, Agus. 2006 *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kementrian Kesehatan. 2010. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2009. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mahendra, Ragus dkk. 2021. Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- Tefa, Gadiana dan Florianus P. Thaal. 2019. Kinerja Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini Di Kawasan Perbatasan RI-RDTL Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.